

---

# REKONSTRUKSI PEMIKIRAN ETIKA LINGKUNGAN EKOFEMINISME SEBAGAI FONDASI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

**Bernadus Wibowo Suliantoro**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: bowo\_mku@yahoo.com

## *Abstract*

*The destruction of nature is caused by the wrong human's point of view towards neighbourhoods. Ecofeminism assumes the caused factor of nature destruction comes from patriarchy culture which more on dualistic logic, hierarchy and the fight for domination. The thought of patriarchy causes destruction of nature and oppression of woman. Ecofeminism thought is interesting to be researched because it offers alternative vision which more sociable and gender balanced. The aim of this research is to explicit, critically evaluate, formulate concept of ecofemisthics ethics thought comprehensively and to reveal new vision relating to keep forest preservation. The chosen literature is analyzed using philosophy method: description, interpretation, and holistic. The result of this research shows that nature preservation is lasting and oppression towards woman is stopped if society abandoned patriarchy thought. Ecofeminism develops the concept of care ethics holistically, interactively, non-reduction, and participatively. Principe of ethics which need to be concerned are responsibility towards the whole biosphere, cosmic solidarity, keeping balance with nature, equal relation, careens and simplicity. The excess of ecofeminism succed in realizing the danger of patriarchy thought towards woman and nature. The weakness of it is that it generalizes and universalizes feministhics values uniformity towards all women instead of apriory negative towards the quality of masculinity values. Ecofeminism develops human moral responsibility based on women special experiences.*

**Key words:** *ecofeminism, patriarchy, oppression, preservation*

## **1. Pendahuluan**

Negara Indonesia sangat kaya dengan sumberdaya alam, termasuk keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Sumberdaya tersebut kini terancam mengalami krisis ekologis, khususnya di sektor kehutanan. Forest Watch Indonesia (2000) mengatakan, hutan di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, meskipun luas daratannya hanya 1,3 persen dari luas daratan di permukaan bumi. Kekayaan hayati ini meliputi 11 persen spesies tumbuhan di dunia, 10 persen spesies mamalia dan 16 persen spesies burung di dunia. Hutan tropis merupakan ekosistem daratan terkaya di bumi ini (Yuda, 2009). Bahkan, Indonesia telah diakui oleh komunitas internasional sebagai satu di antara 7 negara yang memiliki megabiodiversitas.

Namun potret keadaan hutan di Indonesia ternyata semakin buram, kerusakan hutan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sejumlah laporan menyebutkan sekitar 1,6 juta sampai 2,4 juta ha hutan di Indonesia hilang setiap tahunnya atau setara dengan luas enam kali lapangan bola setiap menitnya. Sebelum tahun 1987, laju degradasi hutan dan lahan tercatat sebesar 900.000 ha per tahun. Pada periode 10 tahun berikutnya, tahun 1987 sampai tahun 1997, laju degradasi hutan dan lahan meningkat menjadi 1,6 juta ha per tahun. Pada periode tahun 1997 sampai tahun 2000, angka ini secara drastis meningkat menjadi 3,8 juta ha per tahun (BAPLAN-JICA, 2003).

Era reformasi yang diharapkan sebagai jembatan emas menuju pemerintahan baru yang berpihak terhadap kelestarian lingkungan ternyata masih berjalan dengan setengah hati. Kebijakan otonomi daerah ternyata banyak disalahartikan. Pemerintah daerah menjadi raja-raja kecil yang berhak memanfaatkan hasil hutan di wilayahnya secara besar-besaran sehingga kurang memikirkan nasib generasi mendatang maupun kelestarian

lingkungannya. Di era desentralisasi pemerintah daerah seakan-akan bertindak sebagai pemegang kekuasaan di daerah, berusaha mendongkrak Pendapatan Asli Daerah melalui eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan (Sumarhani dkk., 2004). Perempuan yang hidupnya lebih banyak bergantung pada hasil hutan merupakan pihak paling menderita akibat dari adanya kerusakan hutan.

Penindasan terhadap alam dan perempuan harus dihentikan dengan cara mengembangkan kepekaan kesadaran etis-ekologis serta menyingkirkan berbagai struktur penindasan yang ada di masyarakat. Alam dan perempuan dalam perspektif etika ekofeminisme memiliki kesamaan nasib sama-sama tertindas (Warren, 2002). Etika ekofeminisme berusaha membongkar pola pikir dan kebijakan patriarkhi yang menindas alam dan perempuan menuju pada tata kehidupan yang lebih berkeadilan. Untuk itulah peneliti tertarik menggali secara lebih mendalam serta berusaha merekonstruksikan pemikiran etika lingkungan ekofeminisme yang nantinya diharapkan dapat berfungsi sebagai fondasi bagi pengelolaan hutan lestari.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: Bagaimana pandangan etika ekofeminisme tentang lingkungan yang dibangun atas landasan kosmologis yang berkeadilan ekologis? Prinsip-prinsip etis apa saja yang perlu dikembangkan dalam membangun relasi yang harmoni antara manusia dengan lingkungan menurut perspektif etika ekofeminisme? Apakah kelemahan dan kelebihan dari pandangan etika ekofeminisme tentang lingkungan yang dibangun atas landasan kosmologis? Seberapa jauh pemikiran etika ekofeminisme mengembangkan visi baru di bidang etika lingkungan sehingga dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan pengelolaan hutan yang lestari oleh masyarakat maupun negara?

Tujuan penelitian ini: 1) untuk mengeksplisitkan dan merumuskan secara lebih jelas pandangan etika ekofeminisme tentang relasi antara manusia dengan lingkungan, 2) mensistematisasikan pandangan dasar dari berbagai tokoh etika ekofeminisme yang membahas tentang relasi antara manusia dengan alam dalam satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, 3) melakukan evaluasi kritis berbagai pendapat dan interpretasi dari para tokoh etika ekofeminisme dengan cara menjelaskan kekuatan dan kelemahannya pada setiap argumentasi yang

disampaikannya, serta 4) berusaha menemukan visi dan interpretasi baru berbagai dimensi etis dalam menjalin relasi antara manusia dengan lingkungannya.

## **2. Metode Penelitian**

Objek material penelitian ini berupa pemikiran, konsep, gagasan dan teori dari para filosof ekofeminisme yang memiliki relevansi bagi pengelolaan hutan supaya dapat lestari, sedangkan objek formal dilihat dari sudut pandang etika lingkungan. Sumber data penelitian kepustakaan berupa pemikiran ekofeminisme tentang etika lingkungan yang terkait dengan pengelolaan hutan berasal dari literatur filsafat, kebudayaan maupun kajian gender.

Untuk memperdalam analisis dipergunakan unsur metode filsafat berupa :Deskripsi, Interpretasi, Holistika mengenai hubungan manusia dengan sesama dan alam lingkungan (Bakker, 1990).

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***3.1 Rekonstruksi Landasan Ontologis, Epistemologis dan Axiologis Pemikiran Ekofeminisme terhadap Alam (Kosmos)***

Rekonstruksi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan membangun kembali rangkaian ide/hal yang terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh. Usaha membangun kembali pemikiran ekofeminisme hendaknya didefinisikan sebagai perjuangan untuk mengembalikan penghormatan terhadap alam dan perempuan yang telah dirampas oleh budaya patriarkhi. Nilai-nilai femininitas hendaknya difungsikan sebagai kekuatan moral dalam mengembangkan analisis pemecahan masalah ekologis, demikian pula pembahasan persoalan ekologis hendaknya juga melibatkan perspektif perempuan.

Rekonstruksi pemikiran ekofeminisme dilakukan dengan cara mengungkap dan merumuskan ide-ide dasar yang menjadi fondasi dalam menjalin relasi dengan sesama maupun dengan seluruh isi kosmos. Ide-ide dasar dari pemikiran ekofeminisme ditelusuri asumsi ontologis, epistemologis dan axiologis. Pemikiran kefilsafatan ekofeminisme akan berdiri secara kokoh apabila disangga oleh tiga landasan pokok yaitu landasan ontologi, epistemologi dan axiologi (Suriasumantri, 1988).

#### **a. Landasan Ontologi**

Ontologi Ekofeminisme memandang keberadaan manusia dengan seluruh isi kosmos merupakan “ada yang berelasi”. Seluruh unsur yang ada di dalam kosmos tidak dapat hidup tanpa berelasi satu dengan yang lain. Manusia secara ontologis tidak mungkin hidup terpisah dengan makhluk yang lain. Jati diri manusia dapat ditemukan manakala berkorelasi dengan lingkungannya, oleh karenanya ia harus menyatukan diri dalam kebersamaan dengan lingkungan (Gunawan, 1993,) Sikap yang mengabdikan relasi merupakan bagian yang menonjol dari hakikat hakikat wanita (Giligan, 1993).

Eksistensi manusia selalu ber-koeksistensi dengan sesama maupun dengan segala lingkungan yang melingkupinya. Bumi merupakan ekosistem yang didalamnya terdiri atas berbagai bagian yang antara satu dengan yang lainnya saling terkait, saling membutuhkan, saling mempengaruhi dan saling menentukan. Bagian-bagian terikat dalam satu kebersamaan membentuk jaring-jaring kehidupan. Masing-masing bagian tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa dukungan yang lain (Primavesi, 1990). Ekofeminisme mengembangkan relasi saling ketergantungan antara manusia dengan seluruh unsur kosmis tanpa harus jatuh ke dalam relasi penindasan. Gerakan ekofeminisme menyeberluaskan kesadaran akan adanya tali temali seluruh kosmos, *the cosmic interwovenness, the interconnectednes of all* (Banawiratma, 1997).

Kedudukan manusia dalam keseluruhan struktur kosmis merupakan satu keluarga. Manusia bukan penguasa alam melainkan anggota bagian dari alam. Keberadaan sesama sebagai saudara maupun saudarinya yang saling memperkaya (Shiva, 1993). Shiva (1993) mengutip surat pejabat Seattle, menyatakan bumi bukanlah milik manusia, melainkan manusia milik bumi. Semua saling terkait layaknya hubungan darah yang menyatukan sebuah keluarga. Kesatuan antara manusia dengan alam digambarkan seperti ikatan emosional yang intim antara seorang ibu dengan anaknya. Mereka saling melindungi, saling menyayangi, saling mengasihi, saling meneguhkan dan saling menghormati satu dengan yang lain. Penderitaan yang dialami oleh anak akan dirasakan juga oleh ibu, kebahagiaan yang dirasakan anak juga menjadi kebahagiaan ibu. Apapun yang menimpa bumi akan dirasakan juga anak-anak bumi. Konsep keluarga bumi mencegah kemungkinan

adanya eksploitasi, dominasi dan mengambil keuntungan secara membabi buta.

Kehadiran manusia di dunia sebagai tamu dan bukan sebagai seorang pemilik dan bukan sebagai kolonialis (Shiva, 1993). Seorang tamu hendaknya bersikap santun terhadap seluruh anggota keluarga yang didatangi. Ia hendaknya selalu bersyukur terhadap segala pemberian yang diterimakan padanya. Keberadaan hutan yang sudah memberikan berbagai kebutuhan hidup manusia baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier hendaknya disyukuri sebagai anugerah. Karena itu, mereka harus bersikap hormat kepadanya. Sedangkan kolonialisme mentransformasikan manusia dari peran sebagai tamu menjadi pemangsa yang ganas (Shiva, 1993).

Ekofeminisme menolak cara berpikir dan bertindak dualistis-dikotomis yang memandang realitas menjadi dua bagian yang sangat berbeda sehingga keduanya terpisah sama sekali dan tidak ada hubungan. Bahaya dari pola pikir dualistis-dikotomis melahirkan kebijakan dominasi. Manusia merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada alam sehingga bersikap eksploitatif. Kepentingan manusia selalu diutamakan sementara hutan dengan seluruh organisme yang terdapat di dalamnya hanya dilihat sebagai objek dan sarana untuk memenuhi kepentingan manusia. Pola pikir dualisme semakin memperkokoh cara pandang dunia yang menganggap bahwa alam merupakan objek yang tak berdaya dan pasif maka dapat ditundukkan dan dijajah untuk kepentingan manusia (Shiva, 1988). Dalam relasi sosial kemasyarakatan, laki laki merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan sehingga menghasilkan budaya patriarkhi yang menindas hak-hak perempuan. Berbagai bentuk penindasan seperti subordinasi, beban ganda, kekerasan berlangsung secara sistematis-struktural menimpa perempuan. Ontologi dualistik-dominatif menghasilkan relasi penindasan terhadap alam dan perempuan.

Rekonstruksi landasan ontologi pemikiran ekofeminisme terhadap alam dan manusia dilakukan dengan cara mengubah paradigma berpikir ontologi dualistik-dominasi dalam pemikiran patriarkhi harus diubah menjadi ontologi nondualistis-nonhirarkhis-partisipatif. Perspektif ekofeminis memandang dua hal yang berbeda tidak harus saling dipertentangkan melainkan dapat dijalin kerjasama yang harmonis.

Ekofeminisme menolak model berpikir materialisme. Materialisme merupakan aliran filsafat

yang memandang realitas hanyalah kumpulan materi semata. Di sektor kehutanan cara pandang materialisme menghambat kebijakan pembangunan ekologi yang berkelanjutan. Penekanan cara pandang hutan pada aspek yang bersifat materiil-ekonomis dapat merugikan pengembangan sektor sosial-budaya dan lingkungan hidup. Konsep kesejahteraan direduksi sekedar terpenuhi kebutuhan fisik-material, sehingga aspek lain kesejahteraan manusia seperti kemajuan sosial -budaya , spiritual, estetik tidak mendapat perhatian yang memadai (Keraf, 2006). Rasa hormat terhadap hutan akan luntur ketika keberadaanya hanya dipandang sebagai bahan komoditas. Ekofeminisme memperjuangkan kesucian badan dan alam (*the sacredness of our body and world*) supaya tidak diperlakukan secara sewenang-wenang (Banawiratma, 1997). Gerakan ekofeminisme ingin mendefinisikan ulang nilai “kesucian dan kesakralan” bumi dan manusia yang selama ini dipersepsikan telalu profan (Sukidi, 2001). Ekofeminisme spiritual mengembangkan model spiritualitas yang berdasarkan alam yang selama ini telah dihancurkan oleh dunia modern (Mellor, 2003).

**b. Landasan Epistemologi Ekofeminis**

Pengetahuan merupakan kekuatan yang dapat membentuk watak dan ciri khas kebudayaan. Melalui pengetahuan manusia dapat membudayakan diri, sesama dan lingkungannya. Pengetahuan merupakan salah satu dasar kebudayaan manusia, untuk itu pengembangan pengetahuan harus berada pada jalur tanggung jawab budaya (kultural) (Meliono, 2009). Ekofeminisme menolak titik tolak pandangan Francis Bacon tentang proses pengenalan pengetahuan. Semboyan Bacon yang terkenal “*Science is power*” menjadikan aktivitas mengetahui mengarah pada proses menguasai.

Kegiatan mengenal yang ditujukan untuk menguasai merupakan aktivitas yang tidak manusiawi karena dapat memunculkan logika penindasan dan eksploitatif. Aktivitas mengetahui dan mengenal yang kreatif dan manusiawi adalah mengagumi. Dasar dari suatu proses mengenal, mengetahui, mencari tahu tentang sesuatu adalah kekaguman. Kekaguman merupakan ibu segala ilmu pengetahuan (Woi, 2008). Kekaguman merupakan titik awal untuk memahami realitas sosial maupun alam semesta secara konstruktif dan positif.

Nilai-nilai femininitas merupakan sesuatu yang mengagumkan apabila digali secara lebih mendalam. Nilai-nilai femininitas dapat menjadi visi dasar pengembangan epistemologi. Nilai-nilai yang diasosiasikan sebagai karakter yang melekat pada perempuan seperti memelihara ,menjaga, merawat, berbagi, kerjasama, relasional, solidaritas merupakan sesuatu yang mengagumkan apabila dapat dijadikan dasar pengembangan epistemologi. Angela Miles memasukkan nilai-nilai dan aspek-aspek femininitas (integrative feminisme) dalam proses konstitusi pengetahuan. Nilai-nilai femininitas seperti memelihara, menjaga, relasional, kerjasama, berbagi, cinta, solidaritas dijadikan norma-norma dalam epistemologi feminis (Hidayat, 2006). Penempatan prinsip-prinsip femininitas dalam pengembangan pengetahuan menurut Shiva (1987) dapat menciptakan watak ilmu yang lebih ramah lingkungan, berkeadilan gender, tidak eksploitatif dan tidak reduksionis.

Proses integrasi nilai-nilai femininitas dapat dilakukan dengan cara menyertakan perspektif feminis dalam memecahkan permasalahan ekologis. Perspektif feminis harus menjadi bagian dari upaya mencari solusi terhadap permasalahan ekologi (Dally, 1990). Perspektif feminis hendaknya mewarnai dan



**Gambar 1. Skema pemecahan masalah kehutanan**

menyatu dalam setiap langkah kegiatan mencari pengetahuan. Langkah kegiatan mencari pengetahuan pada hakikatnya memiliki sifat dasar reflektif, kritis, komprehensif, integral, radikal dan sistematis (Pranarka, 2000). Persoalan-persoalan yang ada di sektor kehutanan diproses secara reflektif, kritis, integral, komprehensif, radikal dan sistematis dengan mengikutsertakan pertimbangan nilai-nilai femininitas. Permasalahan kehutanan yang dipecahkan dengan mendasarkan pertimbangan nilai patriarkhi akan menghasilkan pengetahuan yang bersifat dominatif-eksploitatif. Pemecahan masalah kehutanan yang mendasarkan pertimbangan nilai femininitas akan menghasilkan pengetahuan yang selaras dengan azas konservasi. Secara skematis dapat dilihat gambar 1.

### **c. Landasan Axiologi Ekofeminisme**

Para ekofeminis sepakat budaya perempuan yang dekat dan bersahabat dengan alam dapat dijadikan sebagai model untuk melestarikan hutan. Hutan akan lestari apabila dikelola menggunakan prinsip femininitas dan meninggalkan prinsip maskulinitas. Tradisi dan nilai – nilai yang melekat dan diperjuangkan perempuan dianggap memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, sehingga nilai-nilainya dapat diadopsi bagi penataan lingkungan. Budaya patriarkhi mengutamakan kekuasaan dan merusak, sedangkan budaya matriarkhi mengutamakan kelembutan dan relasi emosional akan menjadikan hutan lebih terawat dan terjaga kelestariannya (Hum, 2000). Namun mereka menolak apabila predikat tersebut dilabelkan secara eksklusif pada kodrat perempuan. Pelabelan dapat membuat laki-laki membebaskan dirinya dari tanggung jawab dalam hal pelestarian lingkungan (Henrika, 2008).

Laki-laki maupun perempuan dituntut kesadaran dan tanggung jawabnya terlibat dalam pelestarian lingkungan. Mereka hendaknya mengembangkan sikap dan pemikiran berhati ibu (Henrika, 2008). Panggilan berhati ibu ditandai dalam hidupnya mengembangkan nilai-nilai: hormat terhadap kehidupan (*pro-life*), pengurbanan (rela berkorban demi kebaikan dan kesejahteraan bersama), kecantikan (membuat lingkungan sosial maupun ekologis semakin indah), kedamaian (menciptakan rasa nyaman dan aman bagi sekitarnya) dan kasih sayang (memberikan hidupnya bagi

perkembangan kepribadian sesama maupun lingkungannya).

### **3.2 Prinsip-Prinsip Etis yang Dikembangkan Ekofeminisme Dalam Upaya Melestarikan Hutan**

Prinsip etis merupakan pedoman umum yang dapat dijadikan pegangan untuk mempermudah pengambilan keputusan pada saat berhadapan dengan situasi konkrit. Ekofeminisme memandang bahwa prinsip etis tersebut bukan merupakan kewajiban kaku berlaku mutlak melainkan bersifat kontekstual. Beberapa prinsip etis yang dikembangkan oleh ekofeminisme dalam upaya untuk melestarikan lingkungan, yaitu seperti berikut.

#### **a. Bertanggung Jawab Terhadap Keutuhan Biosfer**

Ekofeminisme mengajak masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran mendalam dan permanen bahwa dirinya merupakan bagian dari unsur biosfer yang diberi tanggung jawab mewujudkan harmoni yang maksimal antar seluruh unsur kosmis. Sikap moral bertanggung jawab mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab terhadap mutu / kualitas biosfer dan tanggung jawab keberlangsungannya. Bertanggung jawab terhadap mutu / kualitas biosfer dalam artian apabila tidak mampu untuk semakin meningkatkan mutu atau kualitas biosfer, minimal “jangan merugikan orang lain”. Sementara itu, tanggung jawab terhadap keberlangsungan dalam artian hendaknya jangan demi kepentingan pribadi melakukan perbuatan yang berakibat mengganggu atau merugikan lingkungan, membahayakan orang lain maupun mengurangi kualitas hidup generasi mendatang.

Ekofeminisme mendukung pada sikap manusia yang perlu bertanggung jawab terhadap nasib generasi mendatang. Tanggungjawab terhadap generasi mendatang muncul karena kesadaran bahwa kehidupan merupakan sesuatu yang sangat bernilai maka harus dijaga kelestariannya (Henrika, 2008). Prinsip tanggung jawab hendaknya menembus batas ruang dan waktu, tidak hanya berhenti pada “kekinian” melainkan sampai ke masa mendatang.

#### **b. Solidaritas Kosmis**

Dibidang etika lingkungan, sikap solidaritas diperluas cakupannya tidak hanya dalam relasi

antarmanusia, melainkan juga mencakup semua unsur yang ada di alam (kosmis), dan tidak hanya bagi generasi sekarang, melainkan juga bagi generasi mendatang. Solidaritas kosmis mendorong manusia mengambil sikap pro-alam, pro-lingkungan dan menentang tindakan yang merusak lingkungan (Keraf, 2006). Solidaritas antargenerasi artinya manusia jangan melakukan sesuatu yang akan mengurangi kemungkinan hidup generasi-generasi yang akan datang (Suseno, 1988).

Solidaritas kosmis mengandaikan adanya perasaan peka untuk menghormati dan menghargai keberadaan suatu hal. Penderitaan alam hendaknya dirasakan sebagai bagian dari penderitaan manusia. Sikap solidaritas yang kuat menghasilkan rasa simpati dengan sesama maupun generasi mendatang. Simpati merupakan mekanisme psikologis dimana seseorang menempatkan diri secara imajinatif ke dalam posisi orang lain untuk bisa melihat, menangkap dan memahami orang yang akan terkena akibatnya. Dengan menempatkan dirinya dalam situasi orang lain, seorang telah melangkah ke luar dari individualitasnya sedemikian rupa sehingga perasaan orang lain diubah menjadi perasaannya juga (Keraf, 1996).

#### **c. Menjaga Keselarasan dengan Alam**

Prinsip keselarasan melarang orang bertindak atas dasar dan pertimbangan egoismenya semata (Suseno, 1984). Kepentingan pribadi harus dipikirkan secara masak-masak jangan sampai merusak ritme alam maupun sosial yang sudah berjalan secara teratur. Kapan pun manusia melakukan perubahan dengan melanggar hukum semesta hasilnya selalu kehancuran (Ni, 1997). Orang hendaknya mengenal batas-batas perbuatan yang dapat dilakukan agar harmoni sosial maupun ekologis dapat terus dipertahankan.

Ekofeminisme sangat menekankan perlunya mengakhiri logika dominasi yang saling beradu kekuatan dan mulai membangun solidaritas dengan seluruh penghuni kosmos sehingga setiap penghuni merasa aman, nyaman dan damai tinggal bersama (Yoshiko, 2000). Berelasi dengan alam hendaknya bukan untuk mencari kemenangan tetapi ketentraman.

#### **d. Menjalini Relasi Setara**

Konsep kesetaraan (egalitarian) ini tidak terjebak pada sikap egalitarian yang naif yang menempatkan kedudukan sama persis antarunsur

kosmis. Sikap egalitarian yang dimaksud oleh kaum Ekofeminisme disini tidak dalam artian menempatkan kedudukan yang sama persis antara manusia dengan makhluk non-manusia. Perjuangannya bukanlah “perlakuan sama”, tetapi “kesamaan untuk dipertimbangkan” (*equality of consideration*). Sebagaimana sikap seorang ibu terhadap anak-anaknya, menempatkan kedudukan setara tidak harus memperlakukan sama. Seorang ibu membelikan baju kepada anak-anaknya tidak harus semua dalam ukuran, warna maupun modelnya. Prinsip egalitarian dalam perspektif ekofeminisme mengandaikan berbagai keinginan, aspirasi dan kepentingan semua pihak diakomodasi secara proporsional.

Prinsip egalitarian dalam relasi manusia dengan alam memiliki pengertian bahwa pengambilan keputusan berdimensi moral bukan hanya memperhitungkan kepentingan manusia saja, melainkan mempertimbangkan juga kepentingan pihak-pihak non-manusia. Egalitarian ekologi menolak diskriminasi biotik yang memandang bahwa kepentingan manusia merupakan sesuatu yang sudah final, yang harus selalu didahulukan dan mengabaikan kepentingan anggota komunitas biotik lainnya (Nugroho, 2001). Egalitarian dalam relasi dengan sesama manusia memiliki pengertian perempuan maupun laki-laki memiliki akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang sama dalam setiap pengambilan keputusan.

#### **e. Kepedulian**

Visi kepedulian terhadap lingkungan yang diperjuangkan tokoh ekofeminis Vandana Shiva sejalan dengan yang diperjuangkan oleh Arne Naes yang dikenal dengan konsep “ekologi-dalam” (*deep ecology*). Vandana Shiva menyadari ada dasar kesamaan dengan ekologi-dalam (*deep ecology*) terutama terhadap penolakan teori-teori nilai rasionalis dan etika lingkungan yang mendasarkan pengambilan keputusan moral berdasarkan prinsip-prinsip abstrak dan aturan-aturan universal yang dihasilkan oleh akal. Namun disisi lain, Vandana Shiva mengkritik terhadap pandangan “ekologi-dalam” karena dipandang kurang peka terhadap ketidakadilan gender. Kritik yang dilakukan oleh “ekologi-dalam” terhadap aliran antroposentrisme dipandang memiliki pengandaian-pengandaian yang buta gender (Spretnak, 2003). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Gilligan ketika mewawancarai perempuan mengatakan “saya berada di dunia

memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang bisa saya buat agar dunia ini menjadi suatu tempat yang lebih baik untuk didiami, tidak peduli betapapun kecilnya sumbangan itu (Gilligan, 1997).

**f. Kesederhanaan**

Prinsip kesederhanaan merupakan kemampuan mengendalikan diri terhadap hal-hal yang bersifat kenikmatan lahiriah. Prinsip kesederhanaan menentang sikap egoisme dan kerakusan manusia dalam memanfaatkan apa yang tersedia di alam. Ekofeminisme menekankan kebutuhan dasar semua makhluk untuk saling berbagi. Dalam berbagi dibutuhkan kemampuan mengendalikan diri untuk memberi kesempatan bagi yang lain (Yoshiko, 2000). Gaya hidup rakus mengumpulkan harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya harus ditinggalkan.

Prinsip kesederhanaan sangat menunjang bagi kelestarian hutan. Prinsip kesederhanaan dapat berfungsi untuk mengerem gaya hidup manusia modern yang bersikap konsumtif, hedonis, rakus dan tamak. Prinsip kesederhanaan tidak berarti manusia tidak boleh memanfaatkan hasil hutan, melainkan perlu bersikap hati-hati dan tetap menjaga agar tidak terjadi kepunahan. Pemanfaatan hasil hutan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, perlu memperhatikan nasib generasi mendatang serta menjaga keutuhannya.

**3.3 Kelebihan dan Kekurangan Etika Ekofeminisme**

Pemikiran ekofeminisme memiliki kelebihan, yaitu dapat membantu menyadarkan masyarakat bahwa akar penindasan terhadap alam dan perempuan bersumber pada budaya patriarki. Struktur patriarki menghancurkan lingkungan karena tidak memberikan peran secara manusiawi terhadap perempuan dan tidak memikirkan kelestarian lingkungan (Darmawati, 2002). Ekofeminisme berhasil mendekonstruksikan pola pikir patriarki yang menindas perempuan dan alam. Selain itu kajian etika ekofeminisme lebih kontekstual dan bumi sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami.

Kelemahan pandangan ekofeminisme terlalu memberikan nilai tinggi pada kualitas perempuan dan bersikap apriori negatif terhadap kualitas maskulin dapat memunculkan hirarki baru. Selain itu ekofeminisme melakukan generalisasi dan universalisasi terhadap nilai-nilai femininitas secara seragam melekat pada semua perempuan. Pada

kenyataan pertumbuhan nilai lebih banyak dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman hidupnya.

**3.4 Strategi ke Depan Pengembangan Etika Ekofeminisme**

Perjuangan moral ekofeminisme pada hakikatnya merupakan perjuangan melawan budaya patriarki yang sudah merampas hak perempuan dan merusak lingkungan. Perempuan yang menjadi korban tradisi patriarki hendaknya mampu bersikap kritis dan pro-aktif untuk membebaskan diri dari belenggu penindasan. Perempuan perlu dibekali kemampuan berpikir rasional yang mendalam dan ditanamkan rasa kepekaan terhadap fenomena ketidakadilan. Melalui pendidikan yang benar kaum perempuan akan mampu bertindak dan berpikir secara independen sehingga ketergantungan terhadap laki-laki dapat dihindari (Nugroho, 1999).

Pendidikan yang mengarah pada kesetaraan gender dan kepedulian lingkungan perlu ditanamkan di lingkungan pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah sejak usia dini dengan tetap mempertimbangkan kematangan psikologis maupun intelektualnya. Pendidikan lingkungan hendaknya sampai pada upaya untuk menghayati sekaligus berbela rasa memperjuangkan terciptanya keadilan sosial maupun keadilan ekologis. Nilai-nilai femininitas perlu diasah dan diasuh terus menerus agar melekat dihati masyarakat.

Perjuangan menegakkan keadilan gender perlu diikuti dengan pembentukan struktur jaringan yang kuat dijenjang birokrasi pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan diberi payung hukum yang kuat. Nilai-nilai etis yang diperjuangkan oleh aliran ekofeminisme dapat menjadi ciri dan pembentukan watak hukum yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai femininitas sebelum dirumuskan dalam aturan hukum perlu diwacanakan secara rasional dan demokratis dalam suasana dialogal agar kaidah yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Lewat wacana ini diharapkan dapat terbentuk tata hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak. Hukum hendaknya memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi pihak yang rentan terhadap perlakuan yang tidak adil. Dalam budaya patriarki, perempuan dan alam merupakan pihak yang selalu berada dalam posisi tertindas dan dirugikan. Oleh karena itulah pembentukan hukum perlu memberikan porsi perhatian yang lebih kepada nasib perempuan

dan alam. Para legislator hendaknya memiliki kepekaan yang lebih dalam menangkap aspirasi dan kebutuhan perempuan serta kelestarian lingkungan.

#### **4. Simpulan dan Saran**

##### **4.1 Simpulan**

- 1) Ekofeminisme mengembangkan konsep etika kepedulian secara holistik, integratif, non-reduksionis dan partisipatif. Perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan ekologis dapat terwujud apabila masyarakat meninggalkan pola pikir dan perilaku patriarkhi dan menghidupkan nilai – nilai femininitas. Hutan akan lestari apabila semua manusia berhati ibu.
- 2) Hutan akan lestari apabila manusia mengembangkan prinsip etis : bertanggung jawab terhadap keutuhan biosfer, solidaritas kosmis, menjaga keselarasan dengan alam, menjalin relasi setara, kepedulian dan kesederhanaan.
- 3) Etika ekofeminisme memiliki kelebihan kajiannya lebih kontekstual, membumi serta berhasil mendekonstruksikan pola pemikiran patriarkhi yang merusak lingkungan dan menindas perempuan.
- 4) Nilai-nilai femininitas apabila terus menerus diasah dan diasuh melalui dunia pendidikan serta diakomodasikan dalam sistem hukum dan

kebijakan politik yang berlaku dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dan kelestarian lingkungan.

##### **4.2 Saran**

Ekofeminisme lahir dalam konteks perjuangan masyarakat Barat yang berlatar belakang ideologi liberal yang rasionalistis, dikembangkan lebih lanjut pada masyarakat budaya Timur dalam tradisi India yang banyak dipengaruhi oleh sistem nilai spiritualistis Hindu. Tradisi pemikiran ekofeminisme yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia hingga saat ini belum dikembangkan secara maksimal. Perlu dilakukan penelitian tentang konsep ekofeminisme dengan mengangkat kearifan lokal masyarakat di wilayah Indonesia.

##### **Ucapan terima-kasih**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah mendanai penelitian ini.
2. Karyawan Perpustakaan: Universitas Indonesia (UI), STF Driyarkara, Fakultas Filsafat UGM, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pusat Studi Wanita UGM, Seminari Tinggi Kentungan Yogyakarta yang telah mengizinkan membaca dan mengcopy sumber pustaka terkait dengan topik penelitian .

#### **Daftar Pustaka**

- Bakker, A. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafa*. Kanisius, Yogyakarta.
- Banawiratma. 1997. "Gerakan Eko-Feminis Perempuan dan Lingkungan Hidup". dalam *Seri Forum LPPS* No. 38.
- BAPLAN-JICA. 2003. *Kebijakan Penyusunan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan*. Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Budianto, I.M. 2009. "Membaca Pemikiran Kenusantaraan dalam Kebudayaan Indonesia" dalam *Makalah International Conference on Philosophy 2009*. Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Dally, L.K. "Ecofeminism, Reference for life and Feminist Theological Ethics" dalam Charles Birch, William Eakin, Jay Mc. Daniel (ed) *Liberating Life Contemporary to Ecological Theology*. New York.
- Gilligan, C. 1993. *Dalam Suara Yang Lain Teori Psikologi Perkembangan Wanita*, diterjemahkan oleh A. Sonny Keraf , 1997, Pustaka Tangga , Jakarta.
- Gunawan, R. 1993. *Filsafat Sex*. Penerbit Bentang, Yogyakarta.
- Henrika, M. 2008. "Panggilan Berhati Ibu Bagi Semua: Kajian Ekofeminis", dalam A. Sunarko OFM, A. Eddy Kristiyanto OFM (ed.). *Menyapa Bumi Menyembah Hyang Ilahi*. Kanisius , Yogyakarta.



- Hidayat, R. 2006. "Kapan Ilmu Akan Berubah?: Lebih Dekat Kepada Metodologi Feminis" *Journal Perempuan* 48.
- Humm, M. 1986. *Feminist Criticism*. The Harvester Press Limited, British
- Keraf, A.S. 2006. *Etika Lingkungan*. Kompas, Jakarta.
- Mellor, M. 2003. "Pemikiran Ekofeminis". dalam *Gender, Lingkungan & Pengurangan Kemiskinan*. Kumpulan Artikel penyunting "Rebeca Elmhirs, Jenifer Elliot (ed), Kerjasama DFID, British Council, Academic Link Program Tear, University of Brighton dan UI .
- Ni, C-H. 1997. *Tao Pedoman Hidup Selaras Dengan Hukum Alam*. Pustaka Delapratasa, Jakarta.
- Nugroho, A.A. 2001. *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*. Grasindo, Jakarta.
- Nugroho, H.B. 1999. "Konsep Wanita Dalam Budaya Jawa" dalam *Jurnal Teologi Gema Edisi Feminisme*. Duta Wacana , Yogyakarta.
- Pranarka. 1991. "Abad XXI Sebagai Era Aufklarung II" dalam *Analisis CSIS*, Jakarta.
- Primavesi. 1990. "The Part for The Whole? An Ecofeminist Equiry". *Journal Theology* Vol XCIII September /Ockt No. 755
- Santoso, H. 2003. "Kritik Atas Bias Ideologi Patriarki Dalam Ilmu Sosial Positivistik". *Journal Teologi* 14.
- Shiva, V.1988. *Bebas dari Pembangunan Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Diterjemahkan Hira Jhamtani 1998, Yayasan Obor bekerjasama dengan KONPHALIDO, Jakarta.
- Shiva, V. dan M. Mies, 1993, *Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Diterjemahkan oleh Kelik Ismunanto & Lilik, 2005, IRE Press, Yogyakarta.
- Spretnak, C. 2003. "Sumbangan Kritis dan Konstruktif Ekofeminisme" dalam Mary Evelyn Tucker (ed.). *Agama, filsafat & Lingkungan Hidup*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sumarhani, M. 2004. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Pendekatan PHBM. dalam *Makalah Expose Hasil Litbanghut dan Konservasi Alam*. Palembang
- Suriasumantri, J.S. 1988. *Filsafat Ilmu*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Suseno, M. 1984. *Etika Jawa*. Gramedia, Jakarta.
- Suseno, M. 1988. *Kuasa dan Moral*. Gramedia, Jakarta.
- Warren, K.J. 2002. "The Power and the Promise of Ecological Feminism". *Environmental Ethics* 12 (2): 125-146.
- Woi, A. 2008. "Manusia dan Lingkungan dalam Persekutuan Ciptaan" dalam A. Sunarko OFM, A. Eddy Kristiyanto OFM (ed.). *Menyapa Bumi Menyembah Hyang Ilahi*. Kanisius, Yogyakarta.
- Yoshiko, I. 2000. "Eco-feminism in the 21 Century". In *God's Image : journal of Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology*. Published by The Centre , Kuala Lumpur, Malaysia.
- Yuda, I.G.N.P. 2009. *Membangun Solidaritas Trans Spisies Untuk Menghadapi Krisis Keanekaragaman Hayati*. Pidato Ilmiah Dies Natalis ke 44 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Penerbitan Atma Jaya Yogyakarta.